

## **Analisis implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banyumas = Analysis of implementation of building permits in Banyumas Regency**

Novi Puspita Sari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20413762&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi salah satunya adanya penurunan yang signifikan atas penerimaan retribusi izin mendirikan. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan hotel dan rumah tinggal serta pemberian sanksi yang kurang tegas atas pelanggaran tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan Data tersebut dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan.

.....Implementation of building permits levy in Banyumas Regency in faces some problems, one of the problems is for a significant decreased on the revenue of building permits levy fees. The significant decreased by the owner of the hotel and residential buildings as well as less weakness low compliance penalty. This research was conducted by using a qualitative approach and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. Data were analyzed using technical analysis of qualitative data. This study show that indicate that the implementation of building permits levy fees in Banyumas regency has not been effective due to a lack of supervision by local authorities. This cause a lack of coordination between the parties concerned and human resources in direct supervision of the fields.